

1

**HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS  
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 5

TAHUN 2008

# Koordinasi PLN & pengembang lemah

Oleh IRSAD SATI  
*Bisnis Indonesia*

**JAKARTA: PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) meminta pengembang melakukan koordinasi dalam setiap mengembangkan proyek perumahan untuk memastikan pasokan listrik tersedia bagi perumahan baru.**

Keluhan pengembang selama ini soal sulitnya mendapatkan sambungan listrik, terutama untuk perumahan sederhana sehat disebabkan tidak adanya koordinasi dengan PLN.

Dirut PLN Fahmi Muchtar mengatakan kesan selama ini bahwa pengembang sulit mendapatkan sambungan listrik karena lemahnya koordinasi pengembangan dengan PLN, sehingga ada perumahan yang tidak tersambung listrik sekalipun sudah selesai dibangun.

"Pengembang supaya melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan jajaran kami di daerah supaya sambungan listrik bisa disiapkan. Koordinasi itu diperlukan untuk merembukan kebutuhan listriknya berapa dan besaran biaya yang dibutuhkan bera-

pa. Itu perlu dikoordinasi terlebih dahulu dengan kami," ungkapnya di sela-sela penandatanganan kesepakatan kerja sama pengembangan perumahan karyawan PLN dengan Perumnas di Jakarta, kemarin.

Dia memberikan contoh keluhan yang disampaikan Perumnas soal kesulitan mendapatkan sambungan listrik yang sebenarnya bisa diatasi kalau sejak awal sudah berkoordinasi dengan PLN.

Selain itu, ungkapnya, kendala penyambungan listrik bagi kawasan perumahan baru juga dipicu oleh letak kawasan perumahan yang tidak jarang jauh dari jangkauan jaringan listrik yang dikelola PLN.

DPP Realestat Indonesia (REI) sudah beberapa kali mengeluhkan

soal kesulitan mendapatkan sambungan listrik untuk pengembangan rumah sederhana sehat (RSh) yang hampir merata di daerah.

Dalam beberapa forum nasional yang pernah dilakukan REI selalu dikeluarkan rekomendasi untuk menyelesaikan masalah kesulitan mendapatkan sambungan listrik.

Ketua Umum DPP REI Teguh Satria mengatakan masalah sambungan listrik merupakan salah satu kendala

utama yang dihadapi pengembang dalam pembangunan perumahan rakyat, sehingga perlu mendapatkan penyelesaian kalau tidak mau program pembangunan sejuta rumah menjadi gagal. (*irsad.sati@bisnis.co.id*)

1

HUBUNGAN MASYARAKAT  
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS  
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA  
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 19

TAHUN 2008

Perawatan Menara Listrik Tegangan Tinggi



Petugas PLN dari tim Pekerjaan dalam Keadaan Bertegangan mengganti isolator menara saluran udara tegangan ekstratinggi di Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (29/4). Perawatan menara dilakukan untuk menghindari gangguan pasokan listrik dari PLTU Suryalaya ke gardu induk Gandul, Jakarta.

KOMPAS/LUCKY PRANSISKA

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 INVESTOR DAILY  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 KORAN KONTAN  
 MEDIA INDONESIA  
 NERACA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA

SUARA KARYA  
 SEPUTAR INDONESIA  
 SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS  
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 13

TAHUN 2008

# Apsurya Penuhi 8 MW

## Industri Lokal Sel Surya Membutuhkan Jaminan Pasar

JAKARTA, KOMPAS — Asosiasi Perusahaan Listrik Tenaga Surya atau Apsurya pada tahun 2008 memiliki kewajiban memenuhi kebutuhan sel surya untuk listrik pedesaan sesuai program pemerintah dengan kapasitas 8 megawatt. Sebetulnya, kapasitas itu memadai untuk mendirikan industri lokal tahap ketiga.

Demikian dikemukakan Sekretaris Jenderal Apsurya Abdul Kholiq kepada *Kompas*, Selasa (6/5) di Jakarta.

"Industri sel surya memiliki tiga tahap. Tahap ketiga merupakan tahap yang paling mudah dengan investasi paling kecil pula, dengan perhitungan akan mencapai tingkat keekonomisan bila produksinya untuk mencukupi kebutuhan pasar minimal 4 megawatt (MW) per tahun," kata Abdul Kholiq.

Dia menguraikan, tahap ketiga industri sel surya itu hanya pada proses *laminating* atau pelapisan sel-sel surya untuk dikemas menjadi sebuah modul atau panel surya. Industri ini ha-

rus mengimpor komponen-komponennya.

Kemudian tahap berikutnya, yaitu tahap kedua, adalah pembentukan sel surya itu sendiri yang disusun dengan material yang tersusun dari silikon. Material tersebut diberi istilah *wafer* silikon.

Menurut Abdul, sebuah industri lokal pada tahap kedua ini akan bertahan jika skala produksinya untuk mencukupi kebutuhan pasar sebesar 20-50 MW.

Industri sel surya tahap pertama akan menelan investasi paling besar dan membutuhkan jaminan pasar yang paling besar pula. Industri ini memproduksi silikon dari pasir kuarsa. Sili-

kon-silikon yang terbentuk kemudian diubah menjadi material yang disebut *wafer* tadi.

"Industri lokal pada tahap pertama ini mempersyaratkan tingkat keekonomisan dengan kapasitas produksi terbesar, yaitu melebihi 50 megawatt," kata Abdul.

Saat ini harga sel surya berkisar 5 dollar AS untuk memproduksi listrik dengan kapasitas 1 watt. Dapat dihitung, nilai produksi sel surya yang menghasilkan 50 megawatt itu akan mencapai 250 juta dollar AS.

Dari sebanyak 20 perusahaan anggota Apsurya, menurut Abdul, diperkirakan saat ini terdapat delapan perusahaan yang berpotensi melangkah menjadi industri lokal. Namun, langkah tersebut masih bergantung pada kebutuhan pasar dalam negeri untuk mencapai syarat-syarat kapasitas produksi minimal.

"Untuk itulah jaminan peluang pasar sangat menentukan langkah pembuatan industri lokal ini," kata Abdul.

Menurut dia, untuk membuka peluang pasar sel surya memang tepat sekali dengan cara penggunaannya pada fasilitas perkantoran di perkotaan. Namun, masyarakat yang tergolong mampu di kota-kota besar seperti Jakarta pun dapat dirangsang untuk menggunakan sel surya.

"Tentu langkah itu harus disertai dengan regulasi untuk bisa menjual listrik ke PLN," ujar Abdul.

Secara terpisah, Direktur Pusat Teknologi dan Konservasi Energi Badan Pengkajian dan Penerapan teknologi (BPPT) Arya Rezavidi, kemarin, mengemukakan, masyarakat tidak perlu ragu untuk mengaplikasikan sel surya.

"Hitung-hitungan nilai produksi Rp 3.000 per kilowatt-hour itu masih sangat konservatif karena *lifetime* (daya tahan) sistem sel surya yang saya perhitungkan hanya untuk 15 tahun," katanya.

Padahal, daya tahan sistem sel surya dengan bahan bakar gratis dari matahari itu juga bisa mencapai 25 tahun lamanya. (NAW)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 INVESTOR DAILY  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 KORAN KONTAN  
 MEDIA INDONESIA  
 NERACA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA

SUARA KARYA  
 SEPUTAR INDONESIA  
 SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS  
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 15

TAHUN 2008

■ PROYEK PERUMNAS

## Perumnas Gandeng PLN Bangun Apartemen

JAKARTA. Ini kabar gembira buat karyawan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Perusahaan Umum (Perum) Perumahan Nasional (Perumnas) menggandeng PLN untuk membangun enam menara apartemen sederhana alias rumah susun sederhana (rusuna) khusus untuk karyawan PLN.

Kerja sama sesama badan usaha milik negara (BUMN) itu tentu membawa keuntungan bagi kedua belah pihak. Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar menyebut, salah satu skema yang paling siap mereka gunakan untuk melaksanakan kongsi ini adalah *build, operate, and transfer* (BOT).

PLN akan menyediakan lahan pembangunan rusuna itu. Adapun Perumnas yang akan membangun dan mengelola rusuna tersebut bagi karyawan PLN golongan menengah dan bawah.

Kelak, setelah seluruh unit laku dan Perumnas telah mendapatkan margin keuntungan dari penjualan unit, apartemen itu bakal menjadi milik PLN. Sayangnya, Fahmi tidak menyebut sampai berapa tahun kontrak BOT itu akan berlaku.

**Pembeli juga mendapatkan subsidi biaya PPN, bunga kredit di bawah bunga pasar.**

Saat ini, Perumnas siap membangun rusuna di tiga lokasi bagi karyawan pabrik setrum pelat merah ini, yaitu di kawasan Ancol, Pulomas, dan Karet.

Menurut Fahmi, luas tanah di tiga lokasi tersebut bervariasi, mulai 2 hektare sampai 5 hektare. "Tanah tersebut tidak akan dijual. Yang penting, aset negara bisa dipakai dengan baik dan tak menyalahi aturan," kata Fahmi, Selasa (6/5).

Nah, syarat lain bagi karyawan PLN yang bisa mendapatkan unit di apartemen itu, ia tinggal di pinggiran Jakarta. Dengan berpindahnya mereka ke tengah kota, Fahmi berharap, produktifitas kerja mereka bertambah.

Perumnas mematok harga tiap unit apartemen itu lebih murah dari harga pasar. Rentang harganya mulai dari Rp 75 juta hingga Rp 144 juta per unit. Para pembeli juga mendapatkan subsidi berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bunga Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) di bawah bunga pasar.

Menurut Juru Bicara Perum Perumnas, Nur Alfiah, bunga subsidi sebesar 9,5% per tahun selama tiga tahun untuk sasaran satu atau yang membeli unit senilai Rp 144 juta. Untuk sasaran dua yang membeli unit seharga Rp 110 juta, bunganya 8,5% selama enam tahun. Terakhir, sasaran tiga, yakni pembeli unit Rp 75 juta, bunganya 7% selama delapan tahun. "Kalau lebih dari masa itu akan dikenakan bunga pasar," tambahnya.

Perumnas berharap *pilot project* dengan PLN ini menggugah BUMN lain mengelola tanah mangkraknya untuk perumahan karyawan. Dalam waktu dekat Perumnas akan menggandeng PT Angkasa Pura I untuk proyek serupa. "Saat ini, kami masih dalam tahap peninjauan," jelas Nur Alfiah.

Rizky Herdiansyah, Gentur Putro

**HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS  
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 13

TAHUN 2008

## PLN Masih Minta Pasokan Pertamina untuk PLTU Grati

DIREKTUR Utama PT Perusahaan Listrik Negara Fahmi Mochtar mengatakan, PLN sah-sah saja meminta PT Pertamina tetap memasok *high speed diesel* (HSD) alias minyak diesel buat Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Grati di Pasuruan, Jawa Timur. Padahal, beberapa waktu lalu, lewat proses tender, PLN telah menunjuk PT Shell Indonesia sebagai pemasok selama tiga tahun ke depan.

Alasannya sederhana, Pertamina masih terikat kontrak dengan PLN. "Kewajiban kontraktualnya belum berhenti. Penandatanganan kontrak dengan Shell itu merupakan prosedur administrasi dalam rangka tender. Tetapi untuk mempersiapkan pasokan dari Shell sendiri, kan, butuh waktu," kata Fahmi.

Fahmi menegaskan, kontrak dengan Pertamina baru berakhir setelah Shell mampu memasok minyak tersebut ke PLTGU Grati. "Perkiraan kami, sih, pada minggu ke-3 atau ke-4 bulan ini sudah masuk. Kami akan minta Pertamina untuk berhenti," tegas pengganti Eddie Widiono ini.

Selain PLTGU Grati, perusahaan minyak berlambang kerang asal Belanda itu juga akan memasok PLTGU Belawan. Dua kontrak tersebut berlaku selama tiga tahun ke depan. Nilai kontrak pengadaan HSD untuk PLTG Belawan sebesar Rp 5,4 triliun. Sedangkan nilai kontrak pengadaan HSD untuk PLTGU Grati sebesar Rp 13 triliun.

Gentur Putro Jati

**HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS  
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA  
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : **M**

TAHUN 2008

### **Tarif Listrik Non Subsidi Berlaku Mulai Mei**

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang mulai mengenakan tarif non-subsidi untuk 135.000 pelanggan sejak Mei 2008. Mereka yang harus membayar lebih mahal dari tarif umum, adalah para pelanggan yang memiliki kapasitas listrik berkisar 6.600 Volt Ampere sampai 200 Kilovolt Ampere.

"Tapi, para pelanggan itu baru terkena tarif mahal, kalau pemakaian mereka melebihi batas rata-rata," kata Azwar Lubis Juru Bicara PLN Jakarta dan Tangerang, kemarin. Sebagian besar para pelanggan yang terkena tarif mahal ini merupakan penghuni kawasan perumahan elite, seperti Menteng di Jakarta Pusat, Kelapa Gading dan Sunter di Jakarta Utara, dan Pondok Indah di Jakarta Selatan.

Sandy Baskoro

6

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 INVESTOR DAILY  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 KORAN KONTAN  
 MEDIA INDONESIA  
 NERACA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA

SUARA KARYA  
 SEPUTAR INDONESIA  
 SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS  
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 20

TAHUN 2008

## PLN Hemat Rp 39 Miliar Per Bulan dari Tarif Multiguna

**JAKARTA-** PT PLN dapat menghemat dana hingga Rp 39 miliar per bulan dari penerapan tarif multiguna bagi golongan di atas R3 (rumah tangga mewah) di Jawa-Bali yang telah dijalankan sejak April 2008. Perhitungan tersebut diperoleh atas dasar pengamatan lapangan manajemen PLN.

"Dari program ini, penggunaan listrik di Jawa-Bali sudah dapat dihemat 200 megawatt (MW). Saat ini beban puncak Jawa-Bali 15.600 MW dari sebelumnya 15.800 MW," ujar Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar di sela acara Pembukaan Asia Oceania Regional Council di Jakarta, Selasa (6/5).

Fahmi menegaskan, selain dari tarif nonsubsidi, PLN juga mewajibkan pembagian lampu hemat energi (LHE) harus sudah terpasang Juli mendatang. PLN menargetkan tahun ini sekitar 51 juta unit LHE terpasang. "Kami telah menyebarkan LHE ke daerah agar penga-

daannya cepat selesai," ujarnya.

Sebelumnya, Fahmi memperkirakan, penghematan yang bisa dilakukan PLN tahun ini bisa mencapai Rp 5 triliun. Angka ini diperoleh dari pengenaan tarif multiguna, percepatan pasokan gas ke pembangkit, dan penyederhanaan sistem administratif. Selain itu, penghematan diperoleh dari konversi bahan bakar jenis *high speed diesel* (solar) ke *marine fuel oil* (minyak bakar).

### Kaji Denda

Fahmi juga menyebutkan, pihaknya hingga kini masih mengkaji kemungkinan mengenakan disinsentif (denda) listrik bagi konsumen 2.200 voltampere (VA). Saat ini, PLN masih menunggu keputusan dari pemerintah.

Saat ini, PLN mengenakan tarif multiguna bagi pelanggan di atas 6.600 VA di lima wilayah, yaitu Riau, Jawa Barat, Kalimantan Ti-

mur, Bangka Belitung, dan Jakarta-Tangerang. Batas hemat bagi daya di atas 6.600 VA adalah 839 kilowatt-hour (KwH) per bulan. Angka tersebut dihitung berdasarkan pemakaian rata-rata nasional 6.600 VA sebesar 1.049 KwH per bulan dikalikan 80%.

Jika pelanggan 6.600 VA memakai listrik di bawah 839 KwH, tarif listriknya sebesar Rp 560 per KwH. Namun, jika di atas 839 KwH, mereka harus membayar sebesar Rp 1.380 KwH dari batas hemat yang dilampauinya. Itu belum termasuk biaya beban yang harus dibayar pelanggan 6.600 VA sebesar Rp 200.640. "Jadi, kalau tidak berhemat, perubahan rekeningnya bisa mencapai 26%," ujar Fahmi.

Fahmi menjelaskan, dari 29 golongan tarif yang ada di R-3, akan ditetapkan batas hemat yang berbeda, dengan basis perhitungan pemakaian rata-rata nasional yang berbeda pula. (her)

**HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS  
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MAY** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 9

TAHUN 2008

**Tarif Non Subsidi Bikin PLN  
Hemat Rp 1,3 M/Hari**

**K**onsumsi listrik sistem Jawa Bali sejak penerapan program tarif non-subsidi mulai April 2008 turun 200 MW. Dengan penurunan ini, biaya penggunaan BBM untuk pembangkit PT PLN pun turun sebesar Rp 1,3 miliar per hari.

"Penurunan daya pada beban puncak ini turun dari 15.800 MW menjadi 15.600 MW," kata Dirut PLN Fahmi Mochtar. Menurut Fahmi, pihaknya merasakan ada penurunan sekitar 200 MW di sistem Jawa Bali. Dengan pertumbuhan normal sebenarnya sudah bisa ada penghematan.

Selain itu, PLN juga mulai mewajibkan pemasangan Lampu Hemat Energi (LHE) pada Juli mendatang. Ia tetap optimis target 51 juta LHE bisa terpenuhi tahun ini.

PLN mengenakan tarif non-subsidi untuk pelanggan listrik 6.600 VA ke atas, atau termasuk pelanggan R3 (rumah tangga mewah). Pengenaan tarif non-subsidi itu sudah diujikan di 5 wilayah yakni Riau, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Bangka Belitung dan Jakarta-Tangerang mulai April.

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS  
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 6

# Tarif Nonsubsidi Dorong Penghematan Rp 1,3 Miliar per Hari

JAKARTA (Suara Karya): PT PLN (Persero) memperkirakan konsumsi listrik sistem Jawa-Bali sejak penerapan program tarif nonsubsidi mulai April 2008 turun sekitar 200 megawatt (MW). Karena itu, biaya penggunaan BBM untuk pembangkit milik PLN pun turun sebesar Rp 1,3 miliar per hari.

2008

Dirut PLN Fahmi Mochtar menjelaskan, penurunan daya pada beban puncak turun dari 15.800 MW menjadi 15.600 MW. "Kita merasakan ada penurunan sekitar 200 MW di sistem Jawa Bali. Dengan pertumbuhan normal sebenarnya sudah bisa ada penghematan. Apalagi dengan konsumsi yang menurun, lebih bagus lagi," kata Fahmi di sela seminar kelistrikan di Jakarta, Selasa (6/5).

PLN mengenakan tarif nonsubsidi untuk pelanggan listrik minimal 6.600 VA ke atas atau pelanggan R3 (rumah tangga mewah). Pengenaan tarif nonsubsidi itu sudah diujikan di lima wilayah, yakni di Riau, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Bangka Belitung, dan Jakarta-Tangerang mulai April.

Terkait langkah penghematan BBM, Fahmi mengatakan, pihaknya tengah berupaya melakukan program pengalihan dari penggunaan solar (*high speed diesel/HSD*) ke minyak bakar (*marine fuel oil/MFO*). Kemudian, lanjut dia, pengalihan HSD ke gas, terutama untuk PLTGU Muara Tawar.

"Pekan lalu saya sudah menandatangani kontrak gas dengan PGN untuk Muara Tawar mencapai 200 juta kaki kubik (MMSCFD) yang *fix* ditambah 100 MMSCFD sebelumnya. Itu sudah mencakup 800 MW," ujarnya.

Sepanjang 2008, Fahmi memperkirakan PLN bisa berhemat sampai Rp 5 triliun jika dibandingkan harus menggunakan bahan bakar solar jenis HSD.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi J Purwono mengatakan, tarif nonsubsidi diterapkan untuk pemakaian yang berlebihan. Bagi masyarakat yang memiliki listrik dengan daya 6.600 VA ke atas, apapun golongannya (bisnis

atau rumah tangga), juga akan diterapkan tarif nonsubsidi.

Menanggapi mendesaknya program penghematan energi tersebut, pemerintah berencana membentuk tim nasional penghematan energi dan sumber daya air yang akan menggalakkan program penghematan energi dan air bersih.

Menurut Purwono, tim yang akan dibentuk melalui inpres ini merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi yang akan dikeluarkan Menko Perekonomian.

"Presiden akan membuat inpres baru sekaligus membentuk tim nasional penghematan energi dan sumber daya air. Tim ini dibentuk untuk mengedukasi masyarakat bahwa harga energi sekarang mahal, jadi harus menghemat," katanya.

Tim ini rencananya akan diketuai Menko Perekonomian dengan Ketua Harian Menteri ESDM. Anggotanya antara lain Menteri Perhubungan, Menteri PU, dan Menristek. Tugas tim itu, antara lain, akan memberi panduan dan standar bagaimana penghematan energi seharusnya dilakukan oleh instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Bahkan khusus untuk instansi pemerintah, akan diterapkan sanksi tertentu jika menggunakan energi di atas batas yang ditetapkan.

Menurut dia, inpres tersebut berbeda dengan inpres sebelumnya yang dikeluarkan pada 2005 tentang hemat listrik. Sebab, pada Inpres 2005 penghematan hanya ditujukan pada instansi pemerintah, itu pun tanpa mekanisme pemberian sanksi.

"Pada pokoknya kita ingin mengurangi penggunaan jumlah kwh-nya, karena secara otomatis juga akan mengurangi besaran subsidi di APBN," katanya. (A Choir)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 INVESTOR DAILY  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 KORAN KONTAN  
 MEDIA INDONESIA  
 NERACA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA

SUARA KARYA  
 SEPUTAR INDONESIA  
 SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS  
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 9

TAHUN 2008

## Perumnas Akan Bangun Rusun di Lahan PLN

### NERACA

Jakarta - Perum Perumnas dan PT. PLN (Persero) menjalin kerja sama antara lain dalam pemanfaatan lahan-lahan milik PLN untuk dibangun hunian bagi karyawannya.

Menurut Direktur Utama PT PLN, Fahmi Mochtar, BUMN yang dipimpinnya itu memiliki sejumlah lahan di beberapa lokasi. Diantaranya berada di kawasan Karet seluas 5.000 meter persegi, Cempaka Putih 5000 meter persegi dan Tanjung Priok seluas 3000 meter persegi.

"Sebagian dari lahan itu dipergunakan untuk keperluan gardu listrik. Namun masih ada sebagian dari lahan yang dapat dikembangkan untuk hunian bekerja sama dengan Perum Perumnas," katanya.

Menurut Fahmi, selama ini PLN belum menyediakan perumahan bagi karyawan termasuk direksinya. Apabila ingin membangun rumah maka mereka harus mencari sendiri lokasinya.

Fahmi mengatakan, kerja sama yang saat ini masih dituangkan dalam nota kesepahaman (MOU), nantinya akan ditingkatkan menjadi perjanjian kerja sama. "Kerja sama saling menguntungkan sebagai langkah lanjutnya PLN akan menjamin ketersediaan listrik pada rumah yang dibangun Perum Perumnas termasuk dalam hal ini Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami)," tuturnya.

Sedangkan Direktur Utama Perum Perumnas Himawan Arief mengatakan, kerja sama dengan PLN akan me-

mudahkan Perumnas mewujudkan membangun Rusunami bagian dari program 1.000 tower pemerintah.

Menurut Himawan, selama ini BUMN memiliki potensi yang sangat besar karena mereka memiliki aset-aset lahan yang apabila dikembangkan melalui sinergi dengan Perum Perumnas akan memberikan hasil yang luar biasa.

Kerja sama saling menguntungkan sebagai langkah lanjutnya PLN akan menjamin ketersediaan listrik pada rumah yang dibangun Perum Perumnas termasuk dalam hal ini Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami)

Fahmi Mochtar,  
Direktur Utama PT PLN

"Sinergi dengan PLN merupakan suatu langkah awal bagi Perumnas melakukan sinergi dengan BUMN untuk membangun hunian yang efisien dan produktif," kata Himawan Arief.

Sementara itu Direktur Pemasaran Perum Perumnas Teddy Robinson mengatakan, setelah menjalin kerjasama dengan PLN, sudah menunggu kerja sama dengan BUMN lain seperti Perum Pegadaian, PT Pos Indonesia, Perum Peruri, dan PT Angkasa Pura I dan II.

Kerja sama dalam memanfaatkan lahan bagi permukiman juga dilaksanakan

dengan kalangan univestitas seperti dilaksanakan dengan Universitas Samratulangi di Manado, katanya.

"Strategi kami memanfaatkan tanah-tanah yang *idle* untuk kemudian dikembangkan baik menggunakan dana sendiri atau kerjasama dengan pemilik tanah," kata Teddy Robinson.

### Verifikasi Aset

Sementara itu, Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil, meminta BUMN untuk memverifikasi aset-aset perusahaannya dan kemudian melaporkannya kepada kuasa pemegang saham sebagai salah satu upaya penataan kembali aset-aset negara.

"Memang semua aset-aset negara akan dibenahi karena itu merupakan bagian dari *good corporate governance* tentang penataan kembali aset-aset negara," kata Sofyan. Pihaknya akan menyelesaikan persoalan tersebut secara hukum dengan baik.

Ia mengatakan, pada intinya hal itu dilakukan agar semua aset-aset tersebut menjadi lebih jelas sehingga laporan keuangan pemerintah selalu dinilai *disclaimer* oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Memang banyak tanah dan bangunan yang tidak jelas status dan prosedurnya karena di masa lalu banyak transfer aset negara yang tidak jelas," katanya.

Banyak aset-aset BUMN yang tidak tertata dengan baik di antaranya ditemukan fakta belum lama ini bahwa ada 21 rumah dinas PT KA yang sudah dialihfungsikan oleh para mantan pejabat PT KA. ● kam/Db

**HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS  
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 25

TAHUN 2008

## Perumnas Bangun Apartemen Karyawan PLN

JAKARTA – Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) akan mengembangkan lahan milik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk apartemen sederhana bagi karyawan BUMN kelistrikan itu.

PLN juga memastikan adanya pasokan listrik pada perumahan yang dibangun Perum Perumnas.

"Sinergi antara Perumnas dan PLN ini turut mendukung penyediaan perumahan dan permukiman yang efisien dan produktif, termasuk program pembangunan 1.000 menara rumah susun sederhana yang dicanangkan pemerintah," kata Direktur Utama Perum Perumnas Himawan Arief, di Jakarta, Selasa (6/5).

Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar mengatakan, langkah PLN mengembangkan aset lahan yang tidak terpakai sebagai rumah susun sederhana (rusuna) itu adalah untuk menyejahterahkan para karyawannya. Sebab, selama ini PLN belum pernah menyediakan rumah bagi karyawannya dan bila ingin membangun rumah, mereka harus mencari sendiri lokasinya. "Bahkan, direksi PLN pun sampai saat ini belum mempunyai rumah dinas. Nah, kami harapkan melalui sinergi dengan Perumnas, para karyawan PLN bisa memiliki rumah sendiri," jelasnya.

Fahmi menambahkan, PLN saat ini memiliki sejumlah lahan di Jakarta yang belum dimanfaatkan dan cocok untuk dibangun perumahan karyawan. Di antaranya adalah di kawasan Karet seluas 5.000 meter persegi (m<sup>2</sup>), Cempaka Putih 5.000 m<sup>2</sup>, dan di Tanjung Priok 3.000 m<sup>2</sup>.

"Sebagian dari lahan itu dipergunakan untuk keperluan gardu listrik. Namun, masih ada sebagian dari lahan yang dapat dikembangkan untuk hunian, bekerja sama dengan Perum Perumnas," ujar Fahmi.

Fahmi mengatakan, kerja sama PLN-Perumnas yang saat ini masih dituangkan dalam nota kesepahaman, nantinya ditingkatkan menjadi perjanjian kerja sama.

"Kerja sama saling menguntungkan lainnya, PLN akan menjamin ketersediaan listrik pada rumah yang dibangun Perum Perumnas, termasuk rumah susun sederhana milik," tuturnya.

### Sinergi Lanjutan

Selain dengan PLN, Perum

Perumnas akan melakukan terobosan dalam kesuksesan program penyediaan sejuta rumah dan seribu menara rusuna melalui kemitraan dengan BUMN, swasta, maupun instansi pemerintah lain. "Mudah-mudahan setelah bersinergi dengan PLN, ada perusahaan BUMN atau instansi pemerintah lain yang akan

bermitra dengan Perumnas," jelasnya.

Direktur Pemasaran Perum Perumnas Teddy Robinson mengatakan, setelah menjalin kerja sama dengan PLN, dalam waktu dekat Perumnas bekerja sama dengan sejumlah BUMN. "Perum Pegadaian, PT Pos Indonesia, Perum Peruri, PT Angkasa Pura I dan II sudah bersedia bekerja sama dengan Perumnas," jelasnya.

Perusahaan-perusahaan yang siap bekerja sama dengan Perumnas itu, jelas Teddy, kebanyakan ingin dibangunkan rumah susun untuk para karyawannya. "Mereka itu punya lahan yang ideal untuk dibangun rusun. Sinergi ini sekaligus mendukung program pembangunan seribu menara rusun yang dicanangkan pemerintah," ujarnya.

Kerja sama dalam memanfaatkan lahan untuk permukiman juga dilakukan Perumnas dengan kalangan universitas, seperti Universitas Samratulangi di Manado.

"Strategi kami adalah memanfaatkan tanah-tanah yang *idle* untuk kemudian dikembangkan sebagai perumahan, baik menggunakan dana sendiri atau kerja sama dengan pemilik tanah," kata Teddy Robinson.

Teddy menambahkan, penandatanganan nota kesepahaman antara Perumnas dan PLN tentang jaminan pasokan listrik akan mencakup seluruh wilayah di Tanah Air. Selama ini, pengembang dan Perumnas kesulitan mendapatkan pasokan listrik ketika membangun perumahan. (asp)

**HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS  
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 13

TAHUN 2008

**Inpres 2005 Hasilkan Penghematan 800 Mw**

INSTRUKSI Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi memberi hasil penghematan daya saat beban puncak hingga 800 megawatt (Mw). Selain itu, pertumbuhan konsumsi energi baik BBM maupun listrik mengalami penurunan. "Inpres pada 2005 memberi dampak penghematan signifikan sekitar 800 Mw dari beban puncak. Juga pertumbuhan konsumsi BBM dan listrik yang menurun," ujar Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi J Purwono, di Jakarta, kemarin. Menurut Purwono, penurunan konsumsi BBM dan listrik terjadi pada pertumbuhan, bukan volumenya. Jika menghitung beban puncak pada 2005 dengan beban puncak tahun ini, peningkatannya memang tidak terlalu besar. Pada 2005, beban puncak PLN sebesar 14 ribu-15 ribu Mw. Sementara itu saat ini, beban puncak sekitar 15.800 Mw. Dengan adanya penghematan 800 Mw, PLN bisa melakukan penghematan sekitar Rp4,62 miliar per hari. (Pia/E-1)

12

**HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS  
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA  
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN    FEB    MAR    APR    **MEI**    JUN    JUL    AGST    SEPT    OKT    NOV    DES  
 1 2 3 4 5 6 **7** 8 9 10 11 12 13 14 15    16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 20

TAHUN 2008

## 51 Juta Pelanggan Jadi Target Program LHE Jalan Terus

**Jakarta, Probisnis RM.**

Meski menuai kritikan terkait program Lampu Hemat Energi (LHE), PT PLN (Persero) tetap optimis jika program ini akan terealisasi dengan baik tanpa ada yang dirugikan.

"Insya Allah, program LHE ini akan dimulai Juli nanti dengan target 51 juta pelanggan di tahun ini," ujar Direktur Utama PT PLN (Persero) Fahmi Mochtar disela Pembukaan Asia Oceania Regional Council Technical Meeting di Jakarta, kemarin.

Soal tarif, Fahmi menjelaskan, PLN mengenakan tarif non subsidi untuk pelanggan listrik minimal 6.600 VA ke atas atau pelanggan R3 (rumah tangga me-

wah). Pengenaan tarif ini, sambungnya, sudah diuji di 5 wilayah diantaranya Jawa Barat, Kalimantan Timur, Riau, Jakarta dan Bangka Belitung, April lalu.

Sementara, terkait proyek 10.000 megawatt (MW) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Labuan, Fahmi mengatakan PLN masih mencari pendanaan untuk merealisasikan proyek tersebut. Dan saat ini, lanjutnya, PLN sudah melakukan penjajakan dengan sejumlah bank-bank asal Cina untuk menjalankan proyek tersebut.

"Semoga pendanaan itu bisa cepat rampung, sehingga proyek PLTU bisa berjalan sesuai dengan rencana," tuturnya. ● FIK

**HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE :  LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 20

TAHUN 2008



**KERJASAMA.** Dirut PT PLN Fahmi Mochtar saat menandatangani MoU pembangunan apartemen sederhana dan perumahan untuk karyawan PT PLN serta penyediaan dan penyaluran tenaga listrik untuk kebutuhan perumahan dengan Dirut Perum Perumnas Himawan Arief Sugoto di Jakarta.

Foto: MAF/IRM

**HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS  
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 15

TAHUN 2008

## Konsumsi Listrik Jawa-Bali Turun 200 MW

JAKARTA — Pemakaian listrik di waktu beban puncak oleh pelanggan PLN di wilayah Jawa-Bali mengalami penurunan 200 megawatt (MW). Penurunan konsumsi listrik ini terjadi dalam satu bulan terakhir.

Direktur Utama PT PLN (Persero), Fahmi Mochtar menyatakan, program tarif listrik non subsidi yang diterapkan PLN kepada pelanggan rumah tangga mewah dengan daya 6.600 volt ampere (VA) ke atas, berdampak terhadap penurunan pemakaian listrik pada waktu beban puncak. "Kami mencatat penurunan beban puncak mencapai 200 MW," ujarnya di Jakarta, Selasa (6/5).

Fahmi menuturkan, selama ini rata-rata pemakaian listrik pada sistem Jawa-Bali di waktu beban puncak berkisar 15.800 MW. Sementara realisasi rata-rata pemakaian listrik di waktu beban puncak sepanjang April 2008, sambungannya, mencapai 15.600 MW.

"Dengan pertumbuhan normal itu, seharusnya kan konsumsi (listrik) lebih tinggi dari sebelumnya," paparnya.

Dari penurunan konsumsi listrik sebesar 200 MW ini, lanjut Fahmi, PLN memperkirakan dapat menghemat sekitar Rp 39,6 miliar sepanjang April 2008. Penghematan tersebut,

tambahnya, setara dengan pemakaian BBM sekitar 150 ribu liter per hari. "Sekarang itu pendistribusian listrik lebih merata. Jadi produktifitas tidak terganggu selama 24 jam," ujarnya.

Terkait dengan program tarif listrik non subsidi, ia menambahkan, pihaknya masih mengkaji kemungkinan untuk memperluas program tersebut ke pelanggan dengan daya 2200 VA ke atas. "Kita masih menunggu apa kata pemerintah. Tapi kita tetap kaji untuk yang 2200 VA," jelasnya.

Dalam kesempatan terpisah Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE) J Purwono, menuturkan dalam waktu dekat pemerintah segera mengeluarkan Inpres (Instruksi Presiden) mengenai program hemat energi. Dalam Inpres hemat energi yang baru ini, jelasnya, pemerintah berencana menerapkan sanksi.

"Sanksi tersebut hanya dikhususkan untuk gedung-gedung instansi pemerintah. Kita akan lakukan monitor untuk instansi pemerintah," ujarnya.

Sementara untuk gedung milik swasta, lanjut dia, tim hemat energi pemerintah tengah mengkaji bentuk sanksi yang akan diberikan. "Bentuk sanksinya nanti dirinci dan akan dirumuskan oleh tim itu," paparnya.

■ dia

15

**HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS  
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 13

TAHUN 2008

■ PENGHEMATAN LISTRIK

## Beban Puncak PLN Berkurang 200 MW

JAKARTA. Sejak pemberlakuan tarif nonsubsidi untuk pelanggan listrik dengan kapasitas 6.600 volt ampere (VA) sejak April lalu, PT PLN mencatat penurunan beban puncak pemakaian listrik sebesar 200 MW, untuk sistem Jawa-Bali. Dampaknya, penurunan beban itu menghemat biaya sebesar Rp 1,32 miliar per hari atau Rp 39,6 miliar per bulan.

Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar bilang, dasar perhitungan penghematan itu adalah mengalikan penurunan daya 200 MW yang tercatat di PLN dengan enam jam yang menjadi jangka waktu pemberlakuan tarif nonsubsidi mulai pukul 17.00 WIB sampai 22.00 WIB. Lantas, hasil perhitungan itu dikalikan lagi dengan tarif pelanggan kapasitas 6.600 VA sebesar Rp 1.100 per kwh. Hasilnya, ketemu angka yang lumayan: Rp 1,32 miliar per hari. "Gede. Bisa stabil seperti ini saja sudah bagus. Apalagi penghematannya bisa lebih besar lagi. Ya, lebih bagus lagi," kata Fahmi, Selasa (6/5).

Dengan penghematan sebesar itu, berarti PLN bisa mengurangi konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk menghidupkan

pembangkit listriknya sebanyak 165.000 liter per hari. Dengan asumsi harga seliter BBM industri sebesar Rp 8.000.

Fahmi mengungkapkan, sebelum PLN meluncurkan kebijakan tarif non subsidi April lalu, pemakaian rata-rata saat beban puncak mencapai 15.800 MW. Saat ini, dalam catatan Fahmi, bebannya cuma 15.600 MW untuk sistem Jawa-Bali. "Berapa total pembayaran listrik ke PLN sejak kebijakan itu diberlakukan, saya belum tahu. Masih harus menunggu tanggal 10 Mei besok atau tagihan pada Juni nanti," tegasnya.

Sampai saat ini, PLN masih menunggu kajian pemerintah sebelum menerapkan kebijakan serupa bagi pelanggan yang menggunakan daya 2.200 VA. Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Jacobus Purwono mengaku masih menggodok penerapan tarif non subsidi untuk pelanggan 2.200 VA meski belakangan ada rencana menaikkan harga BBM. "Kenaikannya itu tidak ada kaitannya dengan listrik," tegasnya.

Gentur Putro Jati

**HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA**

<input checked="" type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> KORAN KONTAN <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA	<input type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA <input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> MIGAS    DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> UMUM <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF	
JAN    FEB    MAR    APR <b>MEI</b> JUN    JUL    AGST    SEPT    OKT    NOV    DES 1 2 3 4 5 6 <b>7</b> 8 9 10 11 12 13 14 15    16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : 5 <span style="float: right;">TAHUN 2008</span>	

## Perumnas garap rusun karyawan PLN

*BISNIS INDONESIA*

JAKARTA: Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) akan membangun dua tower rusunami bagi karyawan PT PLN di kawasan Karet dan Cempaka Putih, Jakarta mulai tahun ini.

Dirut Perumnas Himawan Arif Sugoto mengatakan pembangunan rumah susun sederhana milik (rusunami) untuk karyawan PLN itu ditargetkan selesai pada 2011.

"Pembangunan apartemen sederhana ini merupakan bagian dari program 1.000 tower. Kami punya

### Aset PT PLN di Jakarta untuk rusunami

Lokasi	Luas lahan (m <sup>2</sup> )
Karet	5.000
Cempaka Putih	5.000
Tanjung Priok	3.000

Sumber: Diolah

komitmen kuat untuk membangun rusunami dan membuka peluang kerja sama seluas-luasnya dengan semua pihak," katanya se usai menandatangani nota kesepahaman antara Perumnas dan PLN di Jakarta, kemarin.

Kedua BUMN itu menandatangani nota kesepahaman mengenai

pembangunan apartemen sederhana dan permukiman bagi karyawan PLN.

Di sisi lain, PLN juga akan menyulurkan tenaga kerja di bidang kelistrikan untuk kebutuhan penyediaan rumah yang dibangun Perum Perumnas.

Himawan mengatakan kerja sama dengan PLN merupakan langkah awal penyediaan rusunami di lahan BUMN itu. Ke depannya, katanya, Perumnas akan menggandeng seluruh BUMN untuk membangun rusunami di lahan-lahan yang menganggur. (20)

**HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS  
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 14

TAHUN 2008

## PLN to save up to Rp 474 billion from nonsubsidized tariffs policy

**S**tate power company PT PLN said on Tuesday it would continue

applying nonsubsidized tariffs to higher income consumers and businesses, claiming the move would save about Rp 474 billion (US\$43.4 million) this year in Java and Bali alone.

PLN president director Fahmi Mochtar said during a seminar the company had saved Rp 1.3 billion per day for a month following the introduction of its policy of non-subsidized tariffs.

He said during this period the peak electricity load had dropped by 200 megawatts in the Java-Bali power grid from the normal 15,800 MW to 15,600 MW.

"We hope the power consumption level can be controlled further with this policy," Fahmi said.

PLN began charging nonsubsidized tariffs to customers with an electricity capacity of

**The Jakarta Post**  
Jakarta

more than 6,600 MW in April in the hope of reducing the company's soaring operating costs due to the rise in the price of oil.

PLN operates power plants with a total capacity of 29,705 MW. Almost 30 percent of these plants run on oil-based fuels.

The nonsubsidized tariff program has been implemented in Riau, West Java, East Kalimantan, Bangka Belitung, Jakarta and Tangerang.

The move is part of PLN's cost-cutting measures to save about Rp 2.7 trillion this year to help offset the deficit of almost Rp 5 trillion for the electricity subsidy.

The government allocated Rp 60.3 trillion for the subsidy, against a projected spending of Rp 65 trillion.

PLN also plans to distribute 51 million units of energy-saving lamps to the public by July.

This program aims to cut operating costs by a further Rp 1.52 trillion.

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS  
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 7.2

TAHUN 2008

Bank lokal sepakati kredit Rp7,3 triliun  
**PLN terbitkan obligasi Rp3 triliun**

Oleh M. MUNIR HAIKAL  
Bisnis Indonesia

**JAKARTA: PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan menerbitkan obligasi senilai Rp3 triliun untuk mendukung rencana pembangunan pembangkit listrik.**

Sumber *Bisnis* mengatakan sedikitnya ada enam perusahaan sekuritas yang telah diundang oleh PLN untuk mengikuti seleksi penjamin pelaksana emisi (*underwriter*).

Perusahaan yang diundang PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas, PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Securities, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Securities Tbk.

“Sedikitnya ada enam perusahaan sekuritas yang diundang oleh PLN untuk mengikuti tender penjamin pelaksanaan emisi. Kemungkinan PLN menunjuk dua atau tiga penjamin pelaksana emisi untuk menangani penjualan obligasi senilai Rp3 triliun,” ujarnya, kemarin.

Wakil Direktur Utama PLN Rudiantara ketika dikonfirmasi mengatakan perseroan tidak mempunyai rencana menerbitkan obligasi rupiah.

Dia mengatakan PLN mengantongi kredit senilai Rp7,3 triliun dari sindikasi perbankan lokal. “Jumlah ini melengkapi pendanaan dari sindikasi bank lokal yang mencapai Rp5,7 triliun. Total kredit yang kami raih dari bank lokal mencapai Rp13 triliun.”

Pada pembiayaan tahap pertama senilai Rp5,7 triliun itu, terpilih lima bank yakni PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, dan PT Bank Mega Tbk.

Namun, Rudiantara menolak menjelaskan

detail nama bank yang terlibat dalam pemberian kredit ke PLN.

PLN berencana menerbitkan *sukuk* US\$2 miliar-US\$2,5 miliar untuk membiayai pembangunan pembangkit listrik bertenaga batu bara dengan kapasitas 2.000 MW.

#### Penerbitan sukuk

Dana tersebut untuk tahap awal kebutuhan kegiatan *crash program* PLN dan semula direncanakan terbit pada semester pertama tahun ini. Sebagai syarat penerbitan sukuk, PLN telah

menyiapkan *underlying asset* yang sedang tidak dijamin ke perbankan US\$4,5 miliar.

Namun, pemerintah berencana menerbitkan sukuk pada semester II/2008, sehingga PLN mengisyaratkan menunda penerbitan surat utang tersebut.

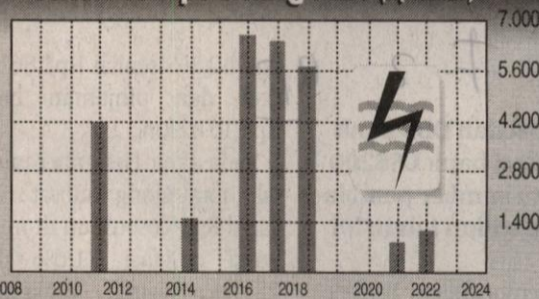
PLN kini membutuhkan pinjaman rupiah untuk PLTU Teluk Naga 3x300 MW, PLTU Pelabuhan Ratu 3x300 MW, dan PLTU Tanjung Awarawar 2x300 MW. Selain itu, pembukaan tender juga dilakukan untuk PLTU di luar Jawa, seperti PLTU Sumatra Utara 2x200MW, PLTU Lampung 2x100-150 MW, dan beberapa PLTU lain.

Kalangan perbankan dalam negeri telah menyarankan PLN untuk meminjam dalam bentuk rupiah dalam mendanai pembangunan proyek PLTU 10.000 mega watt (MW) agar terhindar dari risiko *mismatch currency*.

PLN tinggal mencari pendanaan valas sebesar US\$2 miliar setelah Bank Exim China dan Barclay Group menyepakati pinjaman sebesar US\$1,5 miliar.

Pada proyek listrik PLTU Indramayu dan Rembang yang kebutuhan valas masing-masing US\$261 juta dan US\$592 juta dibiayai oleh Barclays. (*munir.haikal@bisnis.co.id*)

Jatuh tempo utang PLN (Rp miliar)



Sumber: Bloomberg

BISNIS/DENNY IRAWAN